

KATEGORI

Perekonomian

SUB KATEGORI

PDRB

NAMA INDIKATOR

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha** merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan menurut lapangan usaha pada suatu daerah menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
- **PDRB** merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.
- **PDRB Atas Dasar Harga Berlaku** merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
- **PDRB Menurut Lapangan Usaha** dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) sebagai berikut:
 1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
 3. Sektor Industri Pengolahan
 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
 5. Sektor Konstruksi
 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
 8. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
 9. Jasa-Jasa

RUJUKAN

-

RUMUS

-

WALI DATA

BPS Kabupaten Pematang

UKURAN

Rupiah

UNIT

Seksi Statistik Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

INTERPRETASI

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha menunjukkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi menurut lapangan usaha dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

KETERANGAN

-

SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul Konsumsi/Pengeluaran dan Pendapatan Penduduk (Tahunan).

METODOLOGI

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

DDA

